



Program Cerdas Peningkatan Kualitas SDM Prajurit TNI AL di Sektor Operasi Keamanan Laut dalam Mengatasi Ancaman Pelanggaran Hukum di Laut

Smart Program to Improve the Quality of Indonesian Naval Soldiers' Human Resources in Maritime Security Operations Sector to Overcome Threats of Lawlessness at Sea

Risa Apriyani^{1*}, Gatot Supriyadi¹, Rimbun Natanael¹,

¹Akademi Angkatan Laut, Bumimoro, Morokrembangan, Surabaya, Jawa Timur, 60178, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: risaapriyani95@gmail.com

Paper received: 01-04-2024; revised: 17-05-2024; Accepted: 30-06-2024; Published: 30-06-2024

Abstract

This research is a reference for the leader to realize maritime stability in Indonesian waters. At the same time, the specific objective is to improve the quality of human resources' sea legal knowledge for Indonesian Navy soldiers who serve in the Sea Safety (*Kamla*) Operations sectors. This research data source was divided into primary and secondary data. The results of the study showed that it is crucial to realize the Indonesian Navy's vision and mission to improve human resources' quality for Indonesian Navy Soldiers in the *Kamla* Operations sectors in terms of legal knowledge at sea. Therefore, the priority of activities is an intelligent program called as Short Smart Course "Marine Safety Law".

Keywords: *Kamla* Operation; short smart course; maritime security law

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai masukan untuk pemimpin dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan laut di perairan Indonesia. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM dari segi pengetahuan hukum di laut bagi prajurit TNI AL yang berdinasi di sektor-sektor Operasi Keamanan Laut (*Kamla*). Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM Prajurit TNI AL di sektor-sektor Operasi *Kamla* dari segi pengetahuan hukum di laut sangat penting untuk mewujudkan terselenggaranya visi dan misi TNI AL. Prioritas kegiatan yang bisa dibuat sebagai alternatif yaitu program cerdas dengan menyelenggarakan *Short Smart Course* "Hukum Keamanan Laut".

Kata kunci: Operasi *Kamla*; *short smart course*; hukum keamanan laut

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan fakta empiris merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dan memiliki 95.181 km garis pantai yang menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang (Agus Setyo Hartono, 2021) nomor dua di dunia setelah Kanada, serta 75% wilayah Indonesia berupa laut seluas 5,8 juta km² (termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ZEEI) serta posisi geografis Indonesia yang strategis memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Sunda.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri, menjelaskan bahwa di dalam laut yang luas tersebut banyak terkandung kekayaan laut dalam sebelas sektor ekonomi kelautan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, hutan mangrove, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, dan sumber daya non konvensional (Sutaman et al., 2022). Oleh karena itu, melihat kondisi saat ini di perairan Indonesia yang sangat miris dengan maraknya kejahatan terutama dalam bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah kelautan Indonesia yang bisa mengakibatkan suatu polemik perkepanjangan yang berdampak negatif, justru akan menghambat upaya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Idealnya, laut harus terjamin keamanannya, dengan kata lain laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan laut.

Menyikapi kondisi saat ini, diperlukan adanya tindakan nyata yaitu bagaimana meningkatkan kualitas SDM (Mangkunegara, 2013) Prajurit TNI AL selaku unsur penegak hukum di laut dalam mewujudkan terselenggaranya visi dan misi TNI AL terutama misi kedua yang berbunyi “menjamin tegaknya kedaulatan & hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI serta terlaksananya diplomasi Angkatan Laut (AL) dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut” berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut (Kurniawan & Santoso, 2019) dan Prosedur Tetap (Protap) Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan Wilayah Laut Yuridiksi Nasional (Sianturi, 2015). Secara umum, tujuan dari kajian ini adalah dapat digunakan sebagai masukan untuk pemimpin dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan laut di perairan Indonesia. Sedangkan secara khusus, untuk meningkatkan kualitas SDM dari segi pengetahuan hukum di laut bagi prajurit TNI AL yang berdinis di sektor-sektor Operasi Kamla.

2. Metode

2.1. Data Primer

Data yang diperoleh dari pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan narasumber berdasarkan pengalaman kerja dan ilmu bidang hukum atas nama Mayor Laut (KH) Harjanto, S.H. NRP 13631/P.

2.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku referensi yang menunjang, berita dan informasi dari televisi maupun saluran internet seperti peraturan perundangan dan petunjuk administrasi pendidikan Perajurit TNI (Panglima TNI, 2008).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Identifikasi dan Analisis Masalah

Menurut Mayor Laut (KH) Harjanto, S.H., mengingat pentingnya peranan TNI AL selaku penyidik tindak pidana tertentu di laut, maka upaya peningkatan kualitas SDM Prajurit TNI AL dalam hal menjaga keamanan laut dari pelanggaran hukum di laut adalah sebuah potensi positif yang menjadi kekuatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jika

dilihat dari sisi lain dapat dijadikan peluang sebagai awal perbaikan dari sistem kerja yang berjalan di lingkungan TNI AL untuk mencapai kemajuan dan profesionalitas personel.

Proses identifikasi permasalahan dapat dilihat dari kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan akan menjadi dasar analisis pemecahannya dengan langkah awal adalah menemukan isu aktual dalam kondisi saat ini yang terjadi (Imane et al., 2022) pada TNI AL di wilayah perairan Indonesia antara lain: 1) kurangnya sarana dan prasarana yang memadai; 2) kurangnya kualitas SDM personel TNI AL bidang hukum di wilayah perairan Indonesia; 3) kurangnya koordinasi dengan instansi lain; dan 4) kurangnya jumlah personel.

Untuk menentukan masalah pokok yang dominan, digunakan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) (Utari et al., 2020) yang disajikan pada Tabel 1 dan pemecahan masalah disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Tabel Analisis USG

Analisis	U = Urgency	S = Seriousness	G = Growth
	5 = Sangat Urgen	5 = Sangat Serius	5 = Sangat Berkembang
	4 = Urgen	4 = Serius	4 = Berkembang
Bobot Nilai	3 = Cukup Urgen	3 = Cukup Serius	3 = Cukup Berkembang
	2 = Kurang Urgen	2 = Kurang Serius	2 = Kurang Berkembang
	1 = Tidak Urgen	1 = Tidak Serius	1 = Tidak Berkembang

Tabel 2. Pemecahan Pohon Masalah/Pokok Negatif Matrik USG

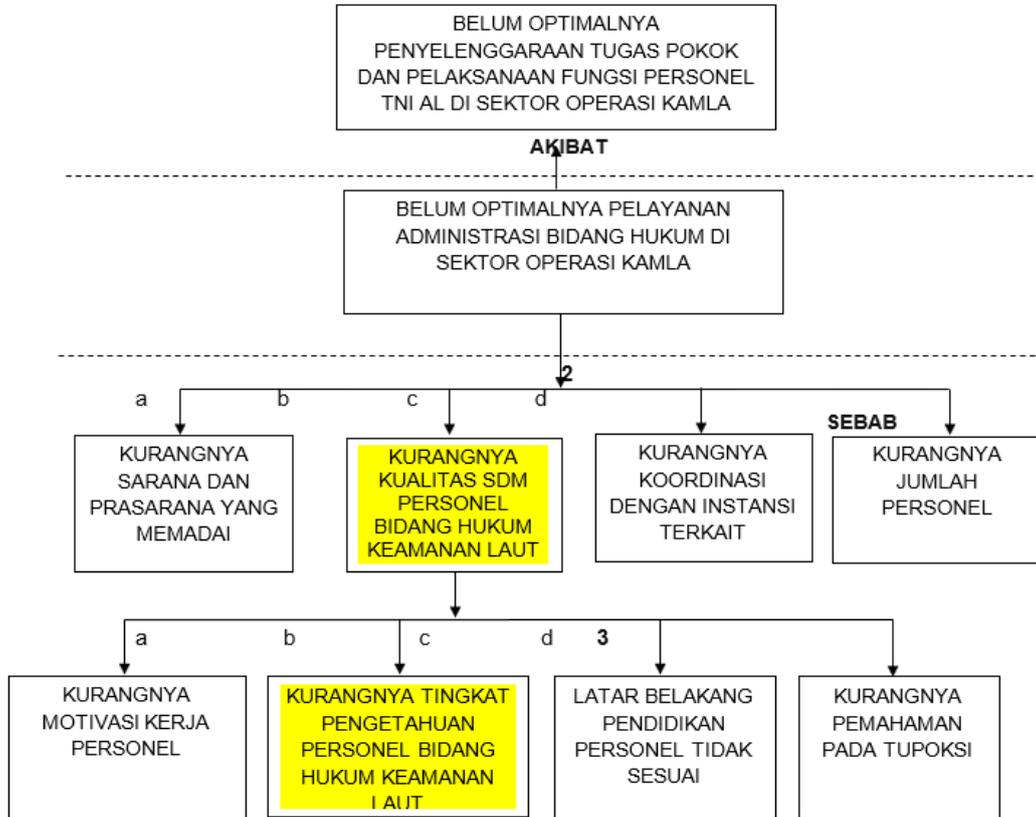
No.	Penilaian Masalah Pokok	Analisa Usg				Ranking
		U	S	G	Bobot	
1.	Kurangnya sarana dan pra sarana yang memadai	5	4	4	13	II
2.	Kurangnya kualitas SDM personel TNI AL bidang hukum di wilayah perairan Indonesia	5	5	5	15	I
3.	Kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang terkait	4	5	3	12	III
4.	Kurangnya jumlah personel	4	4	3	11	IV

Dari keempat masalah tersebut, dipilih masalah utama yang dominan sebagai penyebab kurang optimalnya penanganan keamanan laut di Indonesia yaitu kurangnya kualitas SDM prajurit TNI AL di wilayah perairan Indonesia (Tanjung, 2020). Selanjutnya untuk mengetahui masalah spesifik yang dominan juga dilakukan dengan kajian menggunakan teknik analisis USG yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemecahan Pohon Masalah/Spesifik Negatif Matrik USG

No.	Penilaian Masalah Pokok	Analisa Usg				Ranking
		U	S	G	Bobot	
1.	Kurangnya motivasi kerja personel	5	4	4	13	II
2.	Kurangnya tingkat pengetahuan personel bidang hukum keamanan laut TNI AL di wilayah perairan Indonesia	5	5	5	15	I
3.	Latar belakang pendidikan yang tidak sesuai	4	3	4	11	III
4.	Kurangnya pemahaman personel pada tupoksi	3	4	3	10	IV

Setelah dilakukan analisis dari keempat masalah spesifik, yang paling dominan adalah “kurangnya tingkat pengetahuan personel bidang hukum keamanan laut di wilayah perairan Indonesia”. Untuk dapat menjelaskan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dituangkan dalam pohon masalah Gambar 1.



Gambar 1. Pohon Masalah (Pernyataan Negatif)

Keterangan:

Masalah yang dihadapi adalah no. 1

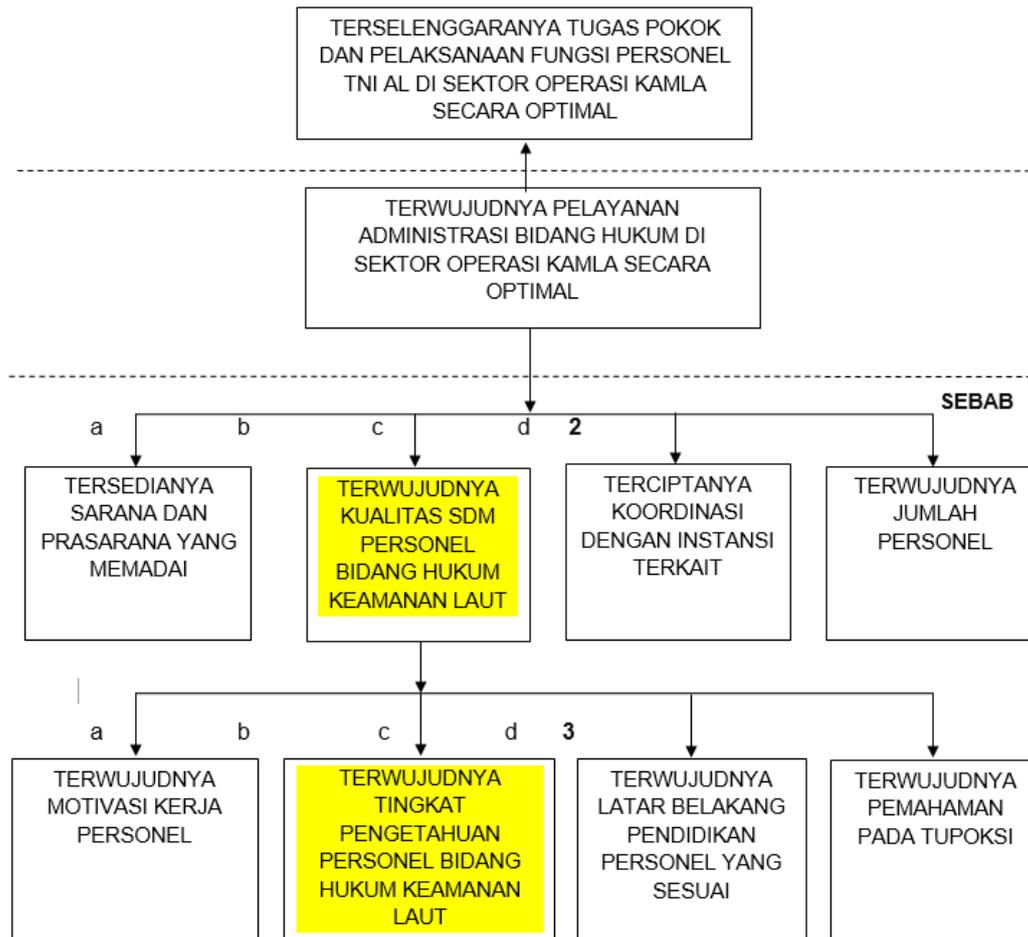
Penyebab masalah no. 1 adalah masalah no. 2b

Penyebab masalah no. 2 adalah no. 3b

Akibat masalah no 1 adalah no. 4

3.2. Sasaran

Untuk menetapkan sasaran yang dikehendaki dengan cara mengubah pernyataan situasi negatif pada pohon masalah menjadi pernyataan positif pada pohon sasaran. Untuk memudahkan pemahaman mengenai analisis sasaran ini, maka divisualisasikan ke dalam pohon sasaran Gambar 2.



Gambar 2. Pohon Sasaran

3.3. Alternatif Program Cerdas

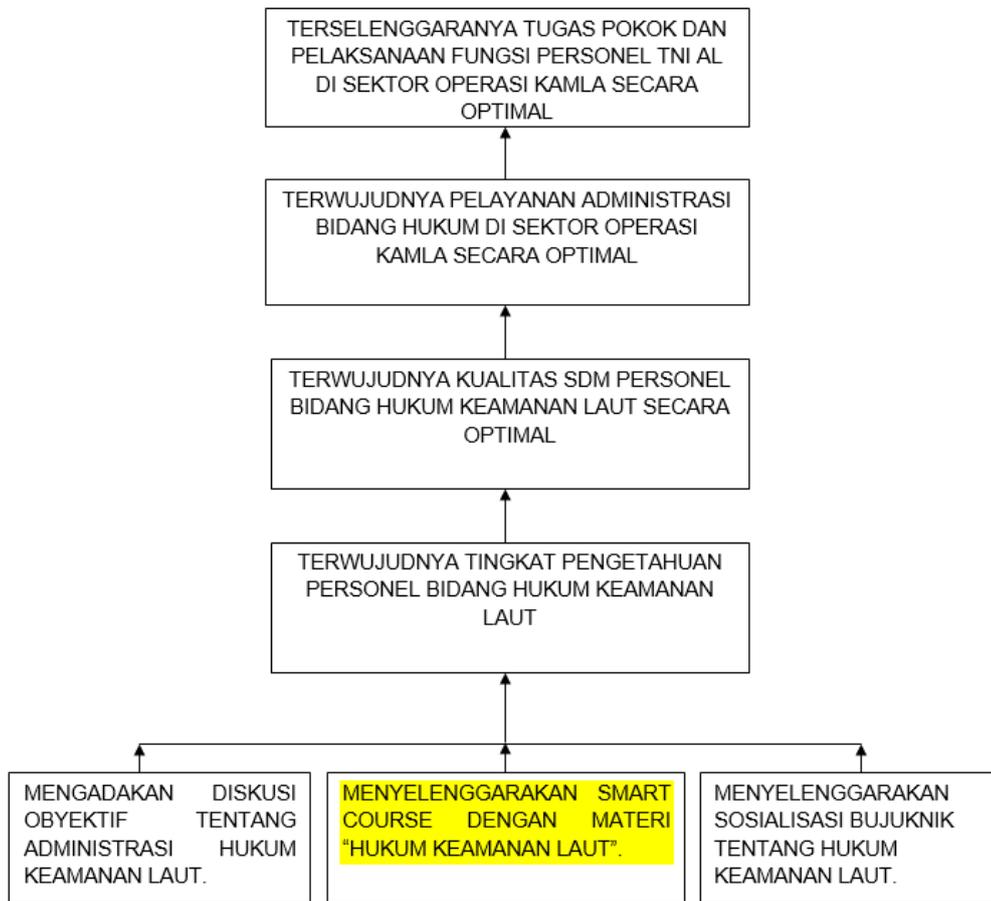
Setelah mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang timbul, sasaran spesifik yang dituju adalah “Terwujudnya tingkat pengetahuan personel bidang hukum keamanan laut. Selain Suspaidikla (Kursus Perwira Penyidik Laut) yang dilaksanakan di masing-masing Kolat (Komando Latihan) Armada dan Suspariksa (Kursus Perwira Pemeriksa) yang dilaksanakan di Diskumal, diperlukan beberapa alternatif program cerdas agar seluruh anggota juga bisa mengikuti dengan maksimal (Wiratama, 2015) yaitu: 1) mengadakan diskusi obyektif antara perwira dan anggota tentang administrasi hukum keamanan laut, dalam hal ini diharapkan dapat menyatukan pendapat dan saling bertukar pikiran dan wawasan para personel; 2) menyelenggarakan *Smart Course* 30 jam dalam 10 hari kerja dengan materi “hukum keamanan laut” dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan wawasan personel tentang hukum keamanan laut; 3) menyelenggarakan sosialisasi Bujuknik tentang hukum keamanan laut.

Dari ketiga alternatif tersebut, dapat dipilih alternatif program cerdas terbaik untuk mewujudkan kinerja personel administrasi bidang hukum keamanan laut melalui analisis CBA (*Cost, Benefit, Analysis*) (Acosta, 2012; Oladunjoye et al., 2021) yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Alternatif Kegiatan Analisis CBA (Cost, Benefit, Analysis)

No.	Alternatif Program Cerdas	B	C	Ratio B/C	Ranking
1.	Mengadakan diskusi obyektif tentang administrasi hukum keamanan laut	3	5	0,6	III
2.	Menyelenggarakan Smart Course dengan materi “hukum keamanan laut”	4	4	1	I
3.	Menyelenggarakan sosialisasi Bujuknik tentang hukum keamanan laut	4	5	0,8	II

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa alternatif nomor 2 yaitu “Menyelenggarakan *Smart Course* dengan materi “hukum keamanan laut” mendapat nilai paling tinggi artinya alternatif terbaik yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pohon alternatif Gambar 3.



Gambar 3. Pohon Alternatif

Dari Gambar 3 diperoleh pemecahan masalah yaitu tercapainya sasaran umum “Terwujudnya kualitas SDM personel bidang hukum keamanan laut yang optimal melalui penyelenggaraan Short Smart Course dengan materi Semua Tentang Hukum Keamanan Laut.”

4. Simpulan

Peningkatan kualitas SDM Prajurit TNI AL di sektor-sektor Operasi Kamla dari segi pengetahuan hukum di laut sangat penting untuk mewujudkan terselenggaranya visi dan misi TNI AL. Prioritas kegiatan yang bisa dibuat sebagai alternatif yaitu program cerdas dengan menyelenggarakan *Short Smart Course* "Hukum Keamanan Laut". Untuk melaksanakan Program Cerdas *Smart Course* "Semua tentang hukum keamanan laut" yaitu dengan menggunakan metode Pola Kerja Terpadu (PKT). Dalam hal ini dapat ditentukan SIABIDIBANYA dengan jelas yaitu: siapa melakukan apa, bilamana dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat diterapkan menggunakan sistem pembagian habis tugas, validasi pemberian jaminan sumber, bahan, metode, organisasi dan prosedur serta tugas kerja yang siap untuk mewujudkan sasaran.

Daftar Rujukan

- Acosta, G. M. (2012). A Review of the Department of the Army's Decentralized Cost Benefit Analysis Process [Walden University PP - United States -- Minnesota]. In *ProQuest Dissertations and Theses*. <https://www.proquest.com/dissertations-theses/review-department-armys-decentralized-cost/docview/1095358260/se-2>
- Agus Setyo Hartono. (2021). Pembentukan Komponen Cadangan sebagai Amanat PP No.3 Tahun 2021 dan UU No.23 Tahun 2019 Tentang PSDN. *WIRA Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 56–63.
- Imane, L., Nourredine, M., Driss, S., & Hanane, L. (2022). Fit-Gap Analysis: Pre-Fit-Gap Analysis Recommendations and Decision Support Model. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.14569/IJACSA.2022.0130749>
- Kurniawan, A., & Santoso, A. I. (2019). Obtaining low water line contour value for enclave claim regime 12 nautical miles on Hatohebi Island Republic of Palau against the Republic of Indonesia in according with UNCLOS 1982 using satellite-derived bathymetry. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 389(1), 1–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/389/1/012028>
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2013). *Perancang dan Pengemabangan SDM*. Bumi Aksara.
- Oladunjoye, O. A., Proverbs, D. G., Beck, C., & Xiao, H. (2021). Cost-Benefit Analysis (CBA) of Sustainable Drainage Systems (SUDS) retrofit: a case study. *International Journal of Environmental Impacts*, 4(1), 14–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.2495/EI-V4-N1-14-24>
- Panglima TNI. (2008). Peraturan Panglima TNI Tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Perajurit TNI. *Peraturan Panglima TNI Nomor: 51/IX/2008*, 10.
- Sianturi, H. M. P. (2015). Peranan TNI AL dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Di Dan Atau Lewat Laut. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa ...*, 1–25. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1292>
- Sutaman, Zoohry, N., Dahuri, R., Matsuoka, T., & Zainudin, A. (2022). Preface: The 1 st International Conference Fisheries and Marine (INFISMA) 2022. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1147(1), 011001. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1147/1/011001>
- Tanjung, A. P. (2020). Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum di Laut. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian ...)*, 8, 78–97. <http://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/54>
- Utari, E., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2020). Analisis Matriks USG (Urgency , Seriousness and Growth) Banten Mangrove Center Bagi Masyarakat Kelurahan. *Biodidaktika: Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya*, 15(2), 31–42. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/biodidaktika/article/download/8720/5797>
- Wiratama, H. (2015). Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana di Laut dalam Mengamankan Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1–30. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1295>